

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
GLOSARIUM	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
RINGKASAN DISERTASI	xiii
SUMMARY OF DISERTATION	xxix
DAFTAR ISI	xxxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	25
1.3. Tujuan Penelitian Disertasi	26
1.4. Kegunaan Penelitian	26
1.5. Kerangka Pemikiran	27
1.6. Metode Penelitian	31
1.7. Orisinalitas Penelitian Disertasi	37
1.8. Sistematika Penulisan Disertasi.....	47
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	49
2.1. Filsafat Pengaturan Kewenangan pada Umumnya	49
2.2. Kerangka Konsepsional	67
2.3. Kerangka Teori	68
1. Teori Keadilan Bermartabat	68
2. Teori Keadilan Pancasila.....	72
3. Teori Sistem Hukum	75
4. Teori Penegakan Hukum.....	83
5. Teori Bekerjanya Hukum.....	86
6. Teori Hukum Progresif	93
7. Teori Kewenangan dan wewenang	98
BAB III KEWENANGAN ANGGOTA LEGISLATIF YANG BERPOTENSI MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI	99
3.1. Pemikiran Dasar Pengaturan Kewenangan Anggota Legislatif.....	116
3.2. Pengaturan Kewenangan Anggota Legislatif	119
3.3. Pengaturan Kewenangan (Tugas) Anggota Legislatif	136
BAB IV PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA LEGISLATIF	156
4.1. Gambaran Empiris Kasus Tindak Pidana Korupsi Anggota Legislatif.....	157

4.2. Penindakan Via Penahanan Terdakwa korupsi Anggota Legislatif.....	159
4.3. Dakwaan Kepada Terpidana Korupsi Anggota Legislatif.....	161
4.4. Pengaturan Kewenangan Anggota Legislatif yang Dilanggar	162
4.5. Modus Operandi I dari Korupsi Terdakwa Anggota Legislatif.....	163
4.6. Modus Operandi II dari Korupsi Terdakwa Anggota Legislatif.....	174
4.7. Modus Operandi III dari Korupsi Terdakwa Anggota Legislatif.....	185
4.8. Harta Kekayaan Terdakwa Korupsi Anggota Legislatif	197
4.9. Harta Kekayaan dalam Periode Menjabat Legislatif yang Kedua.....	201
4.10. Transaksi Mencurigakan Terdakwa Korupsi Anggota Legislatif.....	206
4.11. Penyembunyian/Penyamaran Asal-Usul Harta Kekayaan Terdakwa Korupsi Anggota Legislatif	226
4.12. Pengaturan Pencegahan Korupsi Anggota yang Lemah	236
4.13. Modus Lain dari Korupsi Anggota Legislatif Sebagai Tersangka	248
4.14. Kasasi Pihak JPU KPK dan Terdakwa Korupsi Anggota Legislatif	270
4.15. Pencabutan Hak Politik Terdakwan Korupsi Anggota Legislatif	273

BAB V REKONSTRUKSI KEWENANGAN ANGGOTA LEGISLATIF YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS KEADILAN	325
5.1. Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Anggota Legislatif.....	325
5.2. Modus Korupsi Gratifikasi.....	327
5.3. Hak Imunitas Anggota DPR.....	332
5.4 Fungsi Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif di Beberapa Negara	346

BAB VI PENUTUP.....	355
A. Kesimpulan.....	355
B. Saran	356
C. Implikasi Kajian	357

DAFTAR PUSTAKA
PERUNDANG-UNDANGAN
PUTUSAN PENGADILAN
INTERNET